

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI  
KOTA TANJUNGPINANG MELALUI PROGRAM BANTUAN PANGAN  
NON TUNAI (BPNT) SEBAGAI UPAYA MENCAPAI SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS (SDGs)**

Oleh  
**Yokki Kurnia Perdana**  
**NIM. 180565201008**

**ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan salah satu isu besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Masalah kemiskinan tidak akan pernah habis jika dirunut dari akar permasalahannya. Kemiskinan bukan hanya menjadi isu yang menarik untuk dibahas di tingkat nasional namun di tingkat daerah sendiri kemiskinan masyarakat ini seakan menjalar keseluruh pelosok negeri sebagai contoh di Kota Tanjungpinang ini yang mana angka kemiskinannya termasuk tinggi padahal Kota Tanjungpinang merupakan ibukota provinsi. Berbagai daya dan Upaya telah dilakukan oleh pihak terkait untuk memangkas angka kemiskinan namun yang terjadi di lapangan angka kemiskinan justru semakin naik. Mulai dari bantuan BLT, PKH hingga BPNT sudah diluncurkan pemerintah setempat bekerjasama dengan dinas terkait yaitu Dinas Sosial. Pada penelitian kali ini peneliti ingin meneliti tentang salah satu bantuan yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang mana bantuan ini rutin dilaksanakan mulai dari tahun 2018-sekarang. Peneliti ingin tahu lebih lanjut bagaimana pengimplementasian bantuan ini mulai dari kelemahan hingga kelebihan apa saja yang timbul dari bantuan ini dan apa akibatnya terhadap angka kemiskinan. Berbicara angka kemiskinan tidak terlepas juga dari pembangunan berkelanjutan atau sering disebut dengan SDGs, yang mana pada poin pertama dari SDGs ini yaitu No Poverty (Tanpa Kemiskinan) yang targetnya harus dicapai pada tahun 2030 mendatang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan 7 (tujuh) orang informan. Dalam penelitian ini Teknik yang digunakan yaitu, berupa wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui BPNT ini sudah cukup baik, namun tidak dapat dipungkiri masih adanya kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi terutama dalam penentuan KPM yang menerima bantuan ini, yang sering terjadi miskomunikasi ataupun mis-data antara kejadian yang sebenarnya terjadi dilapangan terhadap data yang diterima oleh pihak terkait. Tidak hanya itu dalam beberapa bulan terakhir penyaluran diubah dari sistem pembelian bahan pangan menjadi uang tunai yang dicairkan langsung melalui ATM tentu ini menjadi suatu keputusan yang harus ditelaah kembali dari tujuan awal dicetuskannya kebijakan ini.

Kata kunci : Kemiskinan, BPNT, Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

**POLICY IMPLEMENTATION OF POVERTY REDUCTION IN  
TANJUNGPINANG CITY THROUGH THE NON-CASH FOOD  
ASSISTANCE (BPNT) PROGRAM AS AN EFFORT TO ACHIEVE THE  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)**

By :  
**Yokki Kurnia Perdana**  
**NIM. 180565201008**

**Abstract**

*Poverty is one of the major issues currently being faced by the Indonesian nation. The problem of poverty will never end if traced from the root of the problem. Poverty is not only an interesting issue to be discussed at the national level, but at the regional level itself, the poverty of this community seems to spread throughout the country, for example in Tanjungpinang City, where the poverty rate is high, even though Tanjungpinang City is the provincial capital. Various efforts and efforts have been made by related parties to reduce the poverty rate, but what is happening in the field is that the poverty rate is actually increasing. Starting from BLT assistance, PKH to BPNT, the local government has launched it in collaboration with related agencies, namely the Social Service. In this study, the researchers wanted to examine one of the aids, namely Non-Cash Food Assistance (BPNT), which is routinely carried out from 2018-present. Researchers want to know more about how this assistance is implemented, starting from the weaknesses to the advantages that arise from this assistance and what the consequences are for the poverty rate. Talking about the poverty rate cannot be separated from sustainable development or often referred to as the SDGs, where the first point of the SDGs is No Poverty (Without Poverty) whose target must be achieved by 2030. This study used a qualitative descriptive method, with 7 (seven) informants. In this study the techniques used were interviews and documentation. The theory used in this study uses the theory of Van Metter and Van Horn. The results of the study found that the implementation of the poverty alleviation policy through BPNT was quite good, but it is undeniable that there are still deficiencies that must be addressed, especially in determining the beneficiaries who receive this assistance, which often occurs miscommunication or mis-data between events that actually occur in the field. data received by related parties. Not only that, in the last few months the distribution has been changed from a system of buying food to cash which is disbursed directly through an ATM, of course this is a decision that must be reviewed again from the original purpose of this policy.*

*Keywords: Poverty, BPNT, Sustainable Development Goals (SDGs)*